

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal abad ke-21 ini, dunia masih terus menyaksikan rentetan perubahan cepat dan mendasar yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses transformasi pada konfigurasi politik dan ekonomi global. Secara politik muncul gelombang demokratisasi yang sarat dengan nilai-nilai kebebasan dan persamaan. Secara ekonomi timbul gejala globalisasi ekonomi pasar yang kental akan nuansa kapitalisme global dan perdagangan bebas.

Seiring dengan perubahan global di atas, Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) berkeinginan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dan membebaskan aliran investasi dari berbagai macam hambatan sesuai dengan tujuan Bogor (*Bogor goals*) tahun 1994. Adapun yang di maksud dengan tujuan Bogor (*Bogor goals*) dalam hal ini adalah investasi serta perdagangan yang terbuka dan bebas di Asia Pasifik pada 2010 untuk negara-negara maju dan 2020 untuk negara-negara berkembang.

Dewan Penasihat Bisnis APEC atau yang lebih di kenal dengan ABAC (*APEC Business Advisory Council*), dalam kajiannya menilai negara-negara anggota APEC telah membuat kemajuan yang signifikan dan membawa keuntungan yang realistis pada dunia usaha dan pada masing-masing negara. Dari studi yang dilakukan ABAC, dalam periode 1995 hingga 2001, negara-negara anggota APEC telah menurunkan tarif hingga sepertiga dari 12% menjadi 7%

APEC juga telah memberi kontribusi sekitar 70% dari pertumbuhan ekonomi dunia, perdagangan telah meningkat 113% menjadi 2,5 triliun dolar AS dan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) juga tumbuh 210%.¹

Antara tahun 1998 dan 2002, APEC melaksanakan 984 proyek pengembangan kapasitas diantaranya pada pengembangan sumber daya manusia, stabilitas pembangunan, serta menciptakan pasar modal yang aman dan efisien. Keuntungan riil dari upaya ini adalah terciptanya 195 juta pekerjaan dan mengurangi kemiskinan hingga sepertiganya. Dalam laporan APEC tahun 2000 diperkirakan 165 juta orang bisa diangkat dari kemiskinan sebagai hasil dari liberalisasi perdagangan dan investasi.²

Namun yang menjadi catatan di sini, kemajuan signifikan yang dicapai oleh anggota-anggota ekonomi APEC menghadapi tantangan baru yaitu “terorisme.” Istilah ini kembali menguat seiring dengan serangan terorisme 11 September 2001 yang menimpa gedung *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon di Amerika Serikat. Istilah terorisme itu sendiri mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjukkan aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat.³

Terorisme berasal dari kata teror dan isme. Teror diartikan untuk mengancam pihak lain sebagai upaya menciptakan efek atau kondisi psikologis seseorang untuk mengambil keputusan di tengah kekhawatiran sesuatu hal. Kondisi tersebut diharapkan mampu menerima apa saja yang di tuntutan oleh pihak

¹ <http://www.pikiranrakyat.com/1003/27/teropong/lainnya61.htm>.

² *Ibid.*

³ Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, hal. 29, lihat juga

yang melakukan teror.⁴ Tragedi kemanusiaan yang memakan korban ribuan orang ini, telah menjadi titik tolak lahirnya isu terorisme sebagai isu global masa kini. Isu terorisme telah mampu menyamai dan mungkin juga telah menggeser isu-isu dalam agenda internasional sebelumnya, seperti masalah hak asasi manusia (HAM), intervensi humaniter, demokratisasi, *good governance*, dan lingkungan hidup.

Menurut T.P. Thornton (*"Terror as a Weapon of Political Agitation"*, 1964: 73-74) "terorisme" adalah penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara eks-normal, khususnya penggunaan ancaman kekerasan.⁵ Dalam lingkup pengertian terorisme seperti itu, Thornton membedakan dua kategori penggunaan teror. Pertama adalah *enforcement terror* yang dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka. Kedua *agitational terror* yakni kegiatan teroristik yang dilakukan mereka yang ingin mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik.

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Shanghai, Cina tahun 2001, mencapai puncaknya ketika para pemimpin ekonomi negara-negara anggota APEC bertemu dalam sebuah forum khusus. Banyak kalangan yang menilai dan mengkhawatirkan bahwa pertemuan kali ini, lebih banyak di dominasi oleh isu-isu anti terorisme yang dipelopori oleh Amerika Serikat.

⁴ Juliet Lodge (ed), *The Threat of Terrorism*, yang di kutip dalam hasil penelitian Surwandono *Diplomasi dan Terorisme*, Jakarta, 1999, hal. 3.

Deklarasi Shanghai yang berjudul *APEC Economic Leader on Counter Terrorism*, menyatakan segala bentuk aksi terorisme yang ditujukan kepada siapa pun dan dalam bentuk apapun merupakan ancaman bagi perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan suatu bangsa. Berkaitan dengan aksi untuk memerangi terorisme ini, para pemimpin APEC menyatakan, untuk berusaha menghindari segala bentuk aksi teror di masa yang akan datang, sesuai dengan piagam PBB dan hukum internasional juga bertekad mewujudkan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1373. Dalam draf deklarasi yang disiapkan para pemimpin ekonomi APEC mengecam serangan teroris di Amerika Serikat 11 September 2001 empat tahun yang lalu, dan berjanji untuk memburu para teroris.

Dalam pertemuan APEC di Shanghai ini, para pemimpin ke-21 negara anggota (Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hongkong, Taiwan, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam) berikrar bahwa pemerintah mereka akan mencegah dan menindas “segala bentuk aksi teror di masa mendatang” sesuai dengan berbagai Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).⁶

Isu terorisme ini juga kembali menjadi pembicaraan ‘hangat’ dalam KTT APEC di Los Cabos, Meksiko tahun 2002. Ke-21 Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menghadiri pertemuan mereka di Los Cabos, Meksiko, Minggu 27 Oktober 2002 dengan menyatakan sikap tegas menghadapi terorisme, setelah satu hari sebelumnya mencapai kesepakatan untuk memutus

6.

membicarakan soal terorisme dan menghasilkan kesepakatan peningkatan kerjasama dalam perang menumpas terorisme internasional.

Oleh karena itu, APEC yang berkeinginan menciptakan kawasan perdagangan bebas dan membebaskan aliran investasi dari berbagai macam hambatan jelas dalam hal ini akan mengalami kendala terutama dalam merealisasikan keinginannya. Kendala ini akan muncul berkaitan dengan masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, isu ini secara tidak langsung akan memberikan dampak pada keamanan di kawasan Asia Pasifik ke depan.

Isu terorisme memiliki kesan telah mengesampingkan isu liberalisasi perdagangan dan investasi yang selalu menjadi tema pertemuan APEC sebelumnya. Kondisi yang demikian dapat dilihat dalam beberapa KTT APEC yang telah berjalan terutama pasca 11 September 2001. Dimulai dari KTT APEC ke-9 di Shanghai, Cina Oktober 2001, KTT APEC ke-10 di Los Cabo, Mexico Oktober 2002 dan terakhir KTT APEC di Thailand, 2003.

B. Pokok Permasalahan

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis menarik sebuah pokok permasalahan sebagai berikut : *“Mengapa pelaksanaan KTT APEC (2001 - 2003) lebih banyak didominasi oleh isu terorisme?”*

men

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh kejelasan tentang mengapa KTT APEC (2001 – 2003) lebih banyak membicarakan isu terorisme dari pada agenda ekonomi yang menjadi motivasi pembentukan APEC.
2. Mengetahui siapa aktor di balik masuknya agenda-agenda non-ekonomi (isu terorisme) dalam KTT APEC, serta hal apa saja yang melatar belakangnya sehingga isu terorisme lebih banyak porsinya untuk dibicarakan dalam KTT APEC yang di maksud.
3. Sebagai bentuk aplikasi teori serta konsep yang telah penulis dapat selama duduk di bangku perkuliahan.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Sebelum penulis menentukan konsep atau teori apa yang akan digunakan dalam menganalisa pokok permasalahan di atas, maka terlebih dahulu penulis berikan definisi dari konsep. Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial.⁷

Untuk menganalisa pokok permasalahan di atas penulis akan menggunakan konsep power, hegemoni, serta propaganda.

Power merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam studi politik, terutama dalam hubungan internasional. Dalam hubungan internasional tidak adanya institusi dan prosedur untuk menyelesaikan konflik seperti dalam

⁷ Sofian Effendi, *Unsur-unsur Penelitian Ilmiah*, dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 14.

kebanyakan sistem politik domestik telah membuat apa yang dinamakan konsep *power* (kekuasaan) menjadi lebih jelas daripada dalam tingkat domestik. Menurut Arnold Wolfers, *power* (kekuasaan) adalah kemampuan untuk menggerakkan 'orang-orang' lain atau memaksa mereka untuk melakukan apa yang dikehendaki dan tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki.⁸ Di samping itu, ia memandang penting untuk membedakan anatar kekuasaan dan pengaruh. Yang pertama berarti kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan ancaman ataupun perampasan hak-hak, sedangkan yang kedua berarti kemampuan untuk melakukan hal yang sama melalui janji-janji ataupun pemberian keuntungan. Ketika membahas konsep *power*, maka yang terbangun di alam pikiran kita biasanya untuk apa sebenarnya *power* ini di miliki oleh suatu negara. Dengan kekuasaan yang dimilikinya sebuah negara dapat melakukan hegemoni terhadap kelas-kelas yang berada di bawahnya.

Hegemoni bagi lenin merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh 'kelas pekerja' dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan dari mayoritas. Dalam pengertian hegemoni ini Gramsci menambahkan dimensi baru pada masalah ini dengan memperluas pengertiannya sehingga hegemoni mencakup peran kelas kapitalis beserta nggotanya, baik dalam merebut/keuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh.⁹

⁸ Harwanto Dahlan, *Teori-teori Hubungan Internasional*, Fisip UMY, Yogyakarta, 1996, hal. 106.

⁹

ini disebabkan adanya beberapa hal yang kemudian menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk melakukan perlawanan terhadap terorisme.

Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang di kawasan Asia Pasifik tidak bisa dilepaskan dari usaha-usaha, pengaruh serta tindakan Amerika Serikat sebagai negara hegemoni, yang menjamin terpeliharanya sistem perekonomian global yang liberal. Selain menjamin terlaksananya sebuah sistem yang liberal Amerika Serikat juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya.

Diantaranya adalah keunggulan dalam bidang teknologi yang kelak akan menyebar ke negara-negara lain untuk mendukung negara hegemoni ini, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan membantu pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Penyebaran teknologi ini akan dibarengi oleh bantuan ekonomi dan perlindungan militer kepada siapapun negara yang dianggap berpotensi untuk menjadi sekutu terkuatnya.¹⁰ Tentu saja penyebaran teknologi tersebut tidak terbatas pada negara-negara maju tetapi juga ke negara-negara yang kurang maju.

Hegemoni bagi lenin merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan dari mayoritas. Dalam pengertian hegemoni ini Gramsci menambahkan dimensi baru pada masalah ini dengan memperluas pengertiannya sehingga hegemoni mencakup peran kelas kapitalis beserta nggotanya, baik dalam

¹⁰

dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diperoleh.¹¹

Bantuan ekonomi akan diberikan kepada negara-negara yang kurang maju dalam rangka membantu usaha-usaha pembangunan negara yang bersangkutan guna memacu pertumbuhan ekonomi mereka. Fungsi yang juga penting adalah kedudukannya sebagai pasar global raksasa yang mampu menyerap barang-barang ekspor dari negara-negara sekutunya. Jadi hanya negara dengan pasar domestik yang sangat besar saja yang pantas menjadi negara hegemoni tersebut.

Pasca serangan 11 September 2001 dengan ambruknya menara WTC, telah membuat adanya pergeseran isu global seperti intervensi humaniter, hak asasi manusia (HAM) telah didominasi oleh isu terorisme tersebut. Sekalipun tragedi teroris itu mempermalukan dan paling mengerikan di ujung abad ke-21 ini. Namun dengan kepiawaian Presiden Amerika Serikat, George W. Bush melalui resolusi kebijakan luar negerinya dapat mengubah menjadi magnet pemersatu negara-negara sekutu maupun negara-negara lainnya di belahan bumi ini. Untuk menumpas lawan-lawan politik lintas negara Amerika Serikat atas nama 'perang' melawan terorisme.

Bahkan secara tidak langsung terorisme oleh Amerika Serikat dapat juga dijadikan instrumen politik untuk menekan, mempengaruhi, bahkan menawan negara-negara lain di dunia, termasuk negara-negara di Asia Pasifik. Salah satunya adalah melalui forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) tanpa

... dan

suka, mau atau tidak mau, harus menelan begitu saja pendefinisian terorisme oleh Amerika Serikat melalui hegemoninya. Dengan segala super power kekuatan, keuangan dan kekuasaannya, Amerika Serikat dapat mengaburkan dan mengelak sebagai biang lahirnya teroris-teroris di dunia.

Dengan demikian arus utama instrumen politik dunia tidak lagi menggunakan ideologi komunis. Tetapi dengan kedok sloganisme seperti pemerataan demokrasi, hak asasi manusia (HAM), atau perdamaian dunia. Dan pasca tragedi 11 September telah berubah lagi yaitu menggunakan instrumen perang melawan terorisme sebagai arus utamanya.

Tidak sedikit organisasi-organisasi internasional, diantaranya PBB, tidak sekedar di'leceh'kan, tetapi juga dijadikan alat kepentingan politiknya. Sampai forum APEC pun tidak luput dari hal itu. Hal ini terbukti seharusnya APEC sebagaimana dideklarasikan 10 tahun yang lalu tepatnya di Bogor adalah murni sebagai wahana kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang disepakati akan mengagendakan investasi atau perdagangan bebas. Akhirnya tak dapat terelakkan juga jika Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Shanghai 2001, Las Cabos 2002, dan di Thailand baru-baru ini, juga dijadikan ajang hegemoni Amerika Serikat. Jika di negara-negara Asia Pasifik harus siap bersekutu dengannya perang melawan terorisme dan melupakan hal-hal terkait dengan konflik-konflik di Timur Tengah. Dalam rangka menghegemoni kelas-kelas dibawahnya maka terkait dengan pelaksanaan KTT APEC, penulis menggunakan

dan makna dari terorisme kepada publik. Dengan demikian Amerika akan memperoleh dukungannya dalam perang melawan terorisme.

Propaganda merupakan bentuk komunikasi yang ditujukan untuk menancapkan data, ide, atau imajinasi ke dalam benak pikiran manusia yang dipacu untuk mempengaruhi pemikiran, emosi, serta tindakan individu atau kelompok.¹² Menurut *Encyclopedia International* propaganda adalah suatu jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi pandangan dan reaksi, tanpa mengindahkan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang disampaikan. Arti dari propaganda dikemukakan sebagai konsep populer yang cenderung menumbuhkan suatu kecurigaan dan rasa takut terhadap kekuatan si propagandis.¹³

Pada abad modern ini propaganda telah berkembang menjadi bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari yakni sebagai bentuk komunikasi yang merupakan bentuk pengetahuan suasif yang cocok dan membedakannya dari peradaban lainnya. Kata propaganda berasal dari bahasa latin *propagare* yang artinya *tot ontwikkeling brengen* (mengembangkan) dan *uitbreiden* (memekarkan).¹⁴ Kata itu timbul dari kata *congregatio de propaganda fide* di tahun 1622 pada waktu Paus Gregotius ke XV mendirikan organisasi yang bertujuan mengembangkan dan memekarkan agama Katholik Roma baik yang ada di Itali maupun di negara-negara lain.

¹² Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, England, Clio Press Ltd., 1982, hal. 67.

¹³

Istilah propaganda sebenarnya merupakan sesuatu yang netral, karena kata itu berarti mempromosikan suatu ide. Tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah ini menjadi cenderung negatif, karena di dalamnya ada unsur-unsur paksaan baik itu kasar maupun halus, untuk meyakinkan suatu ide tertentu.

Lasswel dalam bukunya "*Propaganda Technique in the World War*" (1927) mengatakan bahwa propaganda semata-mata merupakan kontrol opini yang dilakukan melalui simbol-simbol yang mengandung arti atau menyampaikan pendapat yang konkrit dan teliti. Melalui sebuah cerita, humor, laporan gambar-gambar dan bentuk-bentuk lain yang bisa digunakan dalam komunikasi sosial.

Sedangkan menurut Lindley Fraser dalam bukunya yang berjudul *Propaganda* mengemukakan; "*Propaganda may be defined as the activity or the art of inducing others to behave in a way in which they would not behave in its absence*" (propaganda dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau seni untuk mengajak orang lain untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang dikehendaki dan tidak bertingkah laku seperti yang tidak dikehendaki).¹⁵

Seiring dengan terjadinya tragedi 11 September 2001, Amerika Serikat kembali memainkan peranan penting komunikasi globalnya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam upayanya mendominasi dunia adalah dengan komunikasi globalnya. Komunikasi global ini akan memberikan pengaruh terhadap keberadaan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adi daya setelah runtuhnya Uni Soviet.

¹⁵ - - - - -

Amerika Serikat dengan kapasitasnya sebagai negara yang maju bermaksud melakukan pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia terutama dalam masalah terorisme. Upaya ini merupakan bentuk perlawanan Amerika Serikat terhadap terorisme yang telah menurunkan derajat negara Amerika Serikat di mata dunia internasional. Sebab menurut kaca mata orang awam bahwa dengan berbagai alat yang sangat canggih tetap saja negara ini bisa kebobolan oleh para teroris yang berhasil meruntuhkan simbol kejayaan negeri Paman Sam tersebut.

Komunikasi global Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001 adalah komunikasi teror. Sebuah proses komunikasi global yang mempunyai benang merah untuk membicarakan, memperingatkan, mengutuk, menuduh bahkan mengambil langkah-langkah penghancuran suatu negara, orang, jaringan atau lembaga yang terkait dengan terorisme. Sejak saat itulah komunikasi teror Amerika Serikat mendominasi komunikasi global dengan mengedepankan nama-nama yang dituduhkan Amerika Serikat terkait dengan terorisme. Seperti Osama bin Laden, Al Qaeda, Taliban, negara-negara Poros Setan (*Axe of Evil*), seperti Irak, Iran, Korea Utara, dan negara-negara yang diduga sebagai sarang terorisme sehingga menyebabkan Amerika Serikat merasa berhak untuk membasmi tanpa harus meminta persetujuan PBB.

Meskipun Dubes Amerika Serikat Ralph L. Boyce mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat secara formal tidak pernah menyampaikan opini seperti itu kepada media massa, baik media massa di Amerika Serikat, atau media massa internasional di luar Amerika Serikat, namun semua orang telah merasakan

Serikat yang juga sama menerornya dari terorisme yang ingin di basmi. Memang ia tidak mematikan dan menghancurkan bangunan fisik ala menara kembar WTC atau Sari Club di Bali, tetapi ia telah 'mematikan' bangunan sosial dan psikis dari obyek komunikasi teror itu sendiri.

Tragedi WTC mengkondisikan kepada menguatnya komunikasi global Amerika Serikat dan sekutunya. Dahulu sebelum Uni Soviet bubar, musuh komunikasi global Amerika Serikat adalah komunisme. Amerika Serikat dengan gencar perlu mengkampanyekan bahaya dari komunisme, baik yang terang-terangan maupun yang *underground*.

Bukan hanya di Amerika Serikat saja hal yang demikian dilakukan, tetapi juga di negara-negara yang memiliki partai komunis dengan cara menyokong gerakan anti komunis. Misalnya runtuhnya Uni Soviet merupakan kemenangan komunikasi global Amerika Serikat atas komunisme, termasuk menjadikan komunis Cina lebih liberal, memperbesar ketergantungan ekonominya dan memastikan tidak menjadi ancaman laten Amerika Serikat. Tetapi komunisme justru bukan yang menghancurkan Amerika Serikat, sebaliknya terorismelah yang meruntuhkan pusat bisnis WTC dan pertahanan Pentagon.

Tidak heran jika kemudian Amerika Serikat menggunakan pengaruh komunikasi globalnya dengan seefektif mungkin untuk menciptakan pemahaman bersama tentang terorisme. Dengan harapan kampanye anti terorisme yang berhasil segera langsung akan mengamankan Amerika Serikat dan kepentingan-

Begitu traumatiknya atas serangan teror dan seriusnya Amerika Serikat memenangkan perang komunikasi global anti terorisme, justru mengakibatkan komunikasi teror Amerika Serikat sering terjebak kepada propaganda. Hal yang juga disinyalir oleh beberapa organisasi yang mengancam sebagai *black propaganda Amerika Serikat*. Bagi Terrence H Qualter, W.H. Werkmeister dan Jaques Ellul sebuah propaganda merupakan upaya persuasi massa yang dilakukan terus menerus untuk membujuk publik dengan usulan, imbauan emosional, termasuk bukti-bukti tentang suatu hal untuk memperoleh sikap yang diinginkan.

Propaganda terorisme Amerika Serikat dengan demikian akan mengklaim kebenaran tentang terorisme dan tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadapnya. Ia juga menekankan kesegeraan dan kekinian untuk menindaklanjuti ihwal terorisme, seperti menangkap, menghancurkan, memblokir rekening terorisme, dan sebagainya. Dengan demikian tidak perlu lagi melihat sejarah kebelakang tentang penyebab dari lahirnya terorisme yang sebenarnya bisa saja dirahimi oleh Amerika Serikat itu sendiri.

Berkaitan dengan hal di atas, Amerika Serikat berusaha memaksakan skenario imajinatifnya tentang terorisme yang dimilikinya dari pada membuka sebuah forum yang lebih demokratis seperti pengusutan bersama. Boleh jadi karena Amerika Serikat dalam hal ini, merasa sebagai pihak yang paling banyak

E. Hipotesa

Dengan demikian penulis menduga mengapa pelaksanaan KTT APEC (2001 - 2003) itu lebih banyak didominasi oleh isu terorisme?:

"Karena adanya peran dan kepentingan besar Amerika Serikat dalam KTT APEC (2001 – 2003) "

F. Metodologi Penelitian

Metodologi yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah bersifat ekplanatif dan analisis yakni harus menjelaskan dan menganalisa suatu permasalahan berdasarkan data-data dan informasi yang penulis kumpulkan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu data-data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari buku-buku literatur, koran, majalah, dan data yang di *download* dari situs-situs di internet, serta sumber-sumber lainnya yang penulis anggap masih relevan.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian memiliki arti penting dalam melakukan sebuah penelitian. Mengapa penting karena dikhawatirkan di dalam penelitian selanjutnya terdapat sebuah kecenderungan ke arah tertentu dalam membahas pokok permasalahan. Hal ini akan mengakibatkan kepada semakin melebarnya pembahasan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan pembahasan, maka

ruang lingkup penelitian ini, agar sesuai dengan masalah yang dibahas, serta memudahkan penulis nantinya dalam mengatasi kesulitan mencari data.

Dalam penelitian ini penulis batasi sejak tahun 2001 yakni sejak pelaksanaan KTT APEC di Cina sampai KTT APEC di Thailand tahun 2003.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari lima bab dengan berbagai sub topik pembahasan sebagai berikut :

BAB I

Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran secara umum dari isi keseluruhan penelitian yang akan penulis susun. Adapun dalam bab ini penulis turunkan ke dalam: latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan

BAB II

Pada bab ini, penulis akan mencoba memaparkan gambaran secara umum dari Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), di mulai dari munculnya lembaga-lembaga ekonomi regional termasuk di dalamnya APEC sebagai lembaga regional, hal-hal yang menjadi latar belakang dibentuknya APEC, serta perkembangan dan tantangan di forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik

BAB III

Pada bab ketiga ini penulis akan mencoba memaparkan hubungan Amerika Serikat dengan APEC, di mulai dari bagaimana Amerika Serikat melihat APEC, kemudian apa juga kepentingan Amerika Serikat dalam APEC, serta dinamika perjalanan KTT APEC itu sendiri terutama pasca 11 September 2001.

Bab IV

Pada bab empat ini, penulis akan menganalisis tentang propaganda terorisme yang dilakukan Amerika Serikat dalam mendukung kepentingannya melawan terorisme. Langkah apa yang di tempuh oleh Amerika untuk memperoleh dukungan negara-negara sahabat (negara anggota APEC) kaitannya dengan perang melawan terorisme.

BAB V

Pada bab ini akan berisi kesimpulan

Setelah Perang Dingin usai, Amerika Serikat kembali menghadapi "musuh" barunya yakni negara-negara Eropa. Kelompok politik dan kesatuan ini telah menjadi "musuh" baru bagi Amerika Serikat, sebab di satu sisi memang mereka mempunyai kemampuan untuk menyaingi Amerika Serikat terutama dalam masalah perdagangan dunia. Di sisi lain, negara-negara Eropa ini telah mulai bergerak untuk menggabungkan negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni Eropa, setelah negara-negara itu melepaskan diri dari sosialisme, mereka balik mengadopsi ide ekonomi Barat dan sebagai konsekuensinya mereka kemudian menjalankan sistem kapitalisme.

Pergeseran dan perubahan konstelasi politik internasional ini, telah mendorong Amerika Serikat mengumumkan kelahiran Tata Dunia Baru. Prinsip utama dari Tata Dunia Baru di bidang ekonomi antara lain adalah menciptakan perdagangan bebas dan pasar bebas. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia bagi perdagangan dan pendapatan Amerika Serikat itu sendiri.

Untuk mewujudkan strategi ekonominya ini, Amerika berupaya memperlambat dan memperlambat gerak pasar bersama Eropa dengan membentuk blok-blok perdagangan baru, menghidupkan kesepakatan-kesepakatan lama dan mengaktifkannya kembali, serta mendirikan NAFTA, dan membentuk APEC.

Seiring dengan lahirnya Tata Dunia Baru ini, muncul juga sebuah isu global yang kedudukannya sangat merisaukan berbagai negara di belahan bumi ini. Terkait dengan isu yang terakhir ini Amerika Serikat mendeklarasikan